



ANALISIS KETEPATAN SASARAN PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI

Ernila Mei Salirani Telaumbanua¹, Eliagus Telaumbanua², Serniati Zebua³, Meiman Hidayat Waruwu⁴

Alamat: Jl. Karet No.30, Ps. Gn. Sitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli
Fakultas Ekonomi Universitas Nias

ernilatelaumbanua25@gmail.com, eliagus.tel@gmail.com, sernizebua97@gmail.com
meimanwaruwu@unias.ac.id

Abstract. *The Family Hope Program (PKH) is an initiative of the Indonesian government aimed at reducing poverty through conditional cash transfers. The program is designed to improve poor families' access to health, education, and social welfare services. However, despite its implementation, there are still indications of targeting inaccuracies in the distribution of assistance, such as benefits received by households that do not meet the criteria, while eligible families remain unregistered. This study employs a qualitative method with a case study approach to gain an in-depth understanding of the targeting accuracy of PKH assistance distribution in Gunungsitoli City. The case study method was chosen as it allows the researcher to comprehensively explore how PKH assistance is distributed, how beneficiary criteria are applied, and what factors influence the program's effectiveness in achieving its intended goals. The findings reveal that the targeting accuracy of PKH assistance distribution in Gunungsitoli City is relatively good, although several challenges remain. The study identifies key factors that potentially reduce targeting accuracy, including delays in data updating, limited inter-agency coordination, low beneficiary awareness in reporting changes, and the shortage of facilitators. To improve targeting accuracy, the Social Service Office of Gunungsitoli has undertaken efforts such as periodic data verification and validation, strengthening coordination among stakeholders, and encouraging greater community participation.*

Keywords: *Targeting Accuracy, Assistance Distribution, Family Hope Program, Analysis.*

Abstrak. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat. Program ini dirancang untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Meskipun program ini telah berjalan, masih terdapat indikasi ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan, seperti bantuan yang diterima oleh keluarga yang tidak memenuhi kriteria atau sebaliknya, keluarga yang seharusnya menerima justru tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam ketepatan sasaran penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gunungsitoli. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana PKH disalurkan, bagaimana kriteria penerima manfaat diterapkan, serta faktor yang mempengaruhi efektivitas program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketepatan sasaran penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gunungsitoli dapat dikatakan sudah cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang berpotensi mengurangi ketepatan sasaran penyaluran bantuan PKH di Kota Gunungsitoli, yang meliputi keterlambatan pembaruan data, kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran penerima untuk melapor, serta keterbatasan jumlah pendamping. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan adalah verifikasi dan validasi data secara berkala, memperkuat koordinasi antar pihak terkait, dan meningkatkan partisipasi masyarakat penerima.

Kata Kunci : Ketepatan Sasaran, Penyaluran Bantuan, Program Keluarga Harapan, Analisis.

1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023) sekitar 9,5% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kemiskinan tetap menjadi persoalan serius yang mempengaruhi akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai program untuk mengatasi masalah ini yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan pada umumnya merupakan dambaan bagi setiap manusia yang hidup di dunia. Tidak ada satupun manusia yang lahir ke dunia ini ingin hidup dalam keadaan miskin, semua pasti ingin hidup sejahtera. Yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keamanan serta keselamatan hidup yakni konsep yang menunjukkan keadaan, dimana setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya karena tersedianya barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan harga yang relatif murah. Dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keadaan orang yang hidup aman dan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Pasal 34 UUD 1945 secara khusus membahas tentang tanggung jawab negara dalam melindungi fakir miskin dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Ini menjadi landasan konstitusional bagi program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat. Program ini dirancang untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sejak diluncurkan, PKH telah menjadi salah satu program prioritas nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat.

Menurut penelitian Sa'adah et al. (2024) ketepatan sasaran program bantuan sosial seperti PKH sangat dipengaruhi oleh kualitas data dan mekanisme seleksi penerima manfaat. Mereka menemukan bahwa kesalahan dalam penargetan dapat mengurangi dampak positif program dan bahkan memperburuk ketimpangan sosial. Menurut penelitian Nur Aeda & Riadul Jannah (2022) ketepatan sasaran yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas program dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk meningkatkan efektivitas PKH, seperti Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan. Regulasi ini menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan

transparan dalam proses seleksi penerima manfaat. Namun, implementasi regulasi ini di tingkat daerah, termasuk Kota Gunungsitoli, masih menghadapi berbagai kendala.

Kota Gunungsitoli, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara, memiliki tantangan tersendiri dalam penanggulangan kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa Persentase tingkat kemiskinan di kota Gunungsitoli mencapai 14,78% sedikit menurun dari tahun sebelumnya namun masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini menjadikan PKH sebagai program yang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat miskin di wilayah Kota Gunungsitoli.

Peran Dinas Sosial Kota Gunungsitoli sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan sosial di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial dalam mengelola dan mengawasi implementasi PKH. Menurut laporan dari Kementerian Sosial, peran Dinas Sosial di tingkat daerah sangat penting

dalam memastikan bahwa program bantuan sosial seperti PKH dapat mencapai sasaran yang tepat.

Meskipun program ini telah berjalan, masih terdapat indikasi ketidaktepatan sasaran, seperti bantuan yang diterima oleh keluarga yang tidak memenuhi kriteria atau sebaliknya, keluarga yang seharusnya menerima justru tidak tercatat. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa masih ada penerima yang tidak memenuhi kriteria. Contoh kasus keluarga di Desa Lelewonu Niko'otano tercatat sebagai penerima PKH padahal memiliki usaha warung dengan omset kurang lebih 2juta / bulan. Sedangkan ada keluarga yang masih memiliki tanggungan anak sekolah dan tinggal dirumah tidak layak huni namun tidak terdaftar sebagai penerima manfaat PKH. Salah satu tantangan utama adalah ketidakakuratan data penerima manfaat, serta penerima yang status ekonominya membaik tidak diverifikasi ulang.

Hal ini sering disebabkan oleh keterbatasan data kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dinamika perubahan kondisi ekonomi keluarga, serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait. Hal ini dapat mengurangi dampak positif program dan menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengevaluasi ketepatan sasaran program ini. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat juga memengaruhi partisipasi mereka dalam proses verifikasi data. Hal ini menyebabkan banyak data yang tidak terupdate dan akhirnya mengurangi ketepatan sasaran program. Ketidaktepatan sasaran dalam program PKH tidak hanya mengurangi efektivitas program, bahkan juga dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif. Misalnya, masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdaftar dapat merasa terabaikan, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria tetapi menerima bantuan dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana Dinas Sosial Kota Gunungsitoli

mengidentifikasi dan menetapkan keluarga penerima manfaat PKH. Proses seleksi yang transparan dan akurat menjadi

kunci dalam memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan sasaran program PKH di Kota Gunungsitoli, dengan fokus pada mekanisme seleksi dan distribusi bantuan. Menurut penelitian oleh Watif et al. (2024) ketidakadilan dalam distribusi bantuan dapat memperburuk hubungan sosial di tingkat komunitas. Dari sisi ekonomi, ketidaktepatan sasaran juga berpotensi menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Bantuan yang tidak tepat sasaran berarti sumber daya yang terbatas tidak dialokasikan secara optimal, sehingga mengurangi dampak positif program terhadap kesejahteraan masyarakat.

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam, mengingat Program Keluarga Harapan ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar bisa hidup lebih baik, sehat dan mandiri, serta memastikan anak-anak mereka bisa sekolah dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Menurut Sembiring & Nababan (2024) salah satu alat utama yang digunakan untuk menyalurkan bantuan melalui data DTKS untuk dapat memastikan bahwa penyaluran bantuan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala dan penggunaan teknologi untuk mengurangi kesalahan data. Menurut Siregar (2023) menyarankan agar kriteria kemiskinan dalam PKH diperbarui dengan mempertimbangkan indikator multidimensi, seperti akses terhadap sanitas air bersih, dan perumahan layak. Analisis ini akan membantu mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dalam proses penargetan, sehingga dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas program di masa mendatang. Dengan demikian, program PKH dapat lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Gunungsitoli.

2. KAJIAN TEORITIS

Ketepatan sasaran merupakan konsep penting dalam program bantuan sosial yang mengukur sejauh mana bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak. Menurut Putri (2024), ketepatan sasaran tidak hanya sekadar pencocokan data, tetapi juga harus mampu merespons perubahan kondisi ekonomi penerima. Sementara itu, Sumbawati et al. (2020) menyatakan bahwa ketepatan sasaran adalah kemampuan program dalam menyalurkan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebagai sasaran utama. Despriansyah et al. (2024) menegaskan bahwa ketepatan sasaran menjadi penentu keberhasilan program, karena semakin tepat sasaran, semakin efektif program mencapai tujuannya.

Dalam praktiknya, ketepatan sasaran dipengaruhi oleh kualitas data dan mekanisme penentuan penerima manfaat. Suharto (2021) menjelaskan bahwa ketepatan sasaran adalah

kemampuan program menjangkau kelompok yang paling membutuhkan berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan Hasan (2022) menyoroti pentingnya peran lembaga seperti Dinas Sosial dalam mencegah kesalahan sasaran. Ketidaktepatan dapat menimbulkan exclusion error dan inclusion error, sehingga diperlukan verifikasi, validasi, serta pembaruan data secara berkala. Alkire et al. (2023) melalui pendekatan multidimensi juga menekankan pentingnya penggunaan berbagai metode targeting agar hasil penentuan penerima lebih akurat.

Ketepatan sasaran memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas program, mencegah pemborosan anggaran, serta mengurangi ketimpangan sosial. Sianturi (2024) menyebutkan bahwa program yang tepat sasaran mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan bantuan. Selain itu, Tarsan & Ikmal (2021) serta Gentara et al. (2023) menekankan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada tercapainya sasaran yang telah ditentukan. Dengan dukungan monitoring dan evaluasi yang baik sebagaimana dijelaskan oleh Dewi (2023), ketepatan sasaran dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program bantuan sosial seperti PKH.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Gunungsitoli. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara komprehensif, khususnya terkait mekanisme penyaluran bantuan, faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran, serta berbagai upaya yang dilakukan untuk memastikan bantuan tepat kepada penerima yang berhak. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya berfokus pada data angka, tetapi juga menggali makna di balik proses, kebijakan, dan interaksi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hotran dkk. (2023), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna di balik tindakan dan kebijakan dalam konteks sosial tertentu. Hal ini relevan dengan penelitian PKH yang melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, pendamping sosial, dan keluarga penerima manfaat, yang saling berinteraksi dalam proses implementasi program. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada proses identifikasi penerima manfaat, mekanisme penyaluran bantuan, serta persepsi masyarakat terhadap manfaat program. Selain itu, penelitian juga menelusuri faktor pendukung dan penghambat ketepatan sasaran, seperti akurasi data DTKS, peran pendamping sosial, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi data.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Sosial dan pendamping PKH, observasi langsung terhadap proses penyaluran bantuan, serta dokumentasi

berbagai arsip dan laporan program. Dengan teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran faktual dan menyeluruh mengenai implementasi PKH di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana ketepatan sasaran program telah tercapai serta bagaimana dampaknya terhadap efektivitas program dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Gunungsitoli.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam satu fenomena spesifik, yaitu ketepatan sasaran PKH di Kota Gunungsitoli. Melalui studi kasus, peneliti dapat memahami secara detail bagaimana proses penyaluran bantuan dilakukan, bagaimana kriteria penerima diterapkan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap dinamika sosial yang terjadi di lapangan.

Menurut Fadli (2021), penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus sangat efektif untuk memahami fenomena sosial yang kompleks dan dinamis, terutama yang melibatkan banyak aktor dengan peran yang saling berkaitan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan studi kasus membantu peneliti menggali pengalaman dan perspektif para pelaksana program serta penerima manfaat secara lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi tentang pelaksanaan program, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai tantangan, peluang, dan strategi dalam meningkatkan ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan..

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyederhanakan, mengelompokkan, dan memfokuskan berbagai temuan lapangan ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gunungsitoli. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diperoleh gambaran bahwa proses verifikasi dan validasi data telah dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari kunjungan langsung (home visit) oleh pendamping, pengecekan dokumen, hingga sinkronisasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, dalam praktiknya pelaksanaan verifikasi tidak selalu konsisten sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu per semester. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah pendamping, luasnya wilayah kerja, ketidaksesuaian antara data DTSEN dengan kondisi nyata di lapangan, serta adanya ketidakjujuran sebagian penerima manfaat. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya ketidaktepatan sasaran karena data yang digunakan tidak sepenuhnya mutakhir.

Selain itu, tantangan dalam proses validasi data juga cukup kompleks. Lambatnya pembaruan data di tingkat pusat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidaksesuaian data dengan kondisi riil masyarakat. Di samping itu, kurangnya laporan dari masyarakat dan aparat desa, serta perubahan kondisi sosial-ekonomi yang tidak segera terdeteksi, semakin memperbesar potensi kesalahan sasaran. Hal ini tercermin dari masih dominannya kasus inclusion error dibandingkan exclusion error. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat sebenarnya telah berlangsung melalui musyawarah desa dan penyampaian informasi saat verifikasi lapangan. Masyarakat berperan sebagai sumber informasi awal sekaligus pengawas sosial, namun partisipasi tersebut belum optimal karena masih rendahnya keterbukaan dan keterlibatan aktif warga.

Dalam hal kesesuaian kriteria penerima, penetapan penerima PKH telah mengacu pada data DTSEN, komponen kriteria seperti pendidikan, kesehatan, lansia, dan disabilitas, serta klasifikasi DESIL 1–4. Pendekatan yang digunakan merupakan kombinasi antara verifikasi administratif dan sosial. Meskipun demikian, perubahan kondisi penerima yang tidak segera diperbarui menyebabkan ketidaksesuaian dalam penetapan penerima. Hal ini berkontribusi pada munculnya inclusion error dan exclusion error dengan tingkat kesalahan sekitar 20–30%, di mana inclusion error lebih dominan. Penyebab utama kondisi ini adalah lambatnya pembaruan data, sistem yang kurang responsif terhadap perubahan, serta minimnya pelaporan dari masyarakat.

Untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut, telah dilakukan berbagai langkah perbaikan data melalui mekanisme pengajuan perubahan, verifikasi ulang oleh pendamping, dan pengesahan di tingkat desa. Upaya ini didukung oleh koordinasi lintas pihak serta edukasi kepada masyarakat agar aktif melaporkan perubahan kondisi. Namun, proses perbaikan ini masih menghadapi kendala berupa birokrasi yang relatif lambat. Sementara itu, dari sisi ketepatan waktu penyaluran, bantuan PKH pada umumnya telah disalurkan sesuai jadwal nasional, yaitu empat kali dalam setahun. Meski demikian, masih terdapat hambatan seperti gangguan sistem perbankan, keterlambatan transfer dana dari pusat, serta kendala administratif di tingkat desa.

Koordinasi antara Dinas Sosial dan bank penyalur juga menjadi faktor penting dalam kelancaran penyaluran bantuan. Koordinasi ini dilakukan secara terstruktur dan berjenjang melalui komunikasi formal maupun informal, dengan Dinas Sosial berperan sebagai mediator dan pendamping PKH membantu dalam aspek teknis di lapangan. Hasilnya, berbagai kendala pencairan dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Selain itu, pembaruan data dilakukan secara berkala, baik secara rutin setiap bulan maupun secara insidental ketika ditemukan perubahan kondisi. Keberhasilan pembaruan data ini sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan koordinasi antar pihak yang terlibat.

Terakhir, proses pendataan ulang dalam program PKH melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, aparat desa, pendamping PKH, hingga Dinas Sosial. Tahapan yang dilakukan

meliputi pengusulan, verifikasi, validasi, hingga input data ke dalam sistem. Meskipun proses ini bersifat kolaboratif, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti koordinasi yang belum optimal dan kurangnya informasi kepada penerima terkait jadwal pendataan. Secara keseluruhan, hasil reduksi data menunjukkan bahwa ketepatan sasaran PKH di Kota Gunungsitoli telah diupayakan melalui mekanisme yang sistematis, namun masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal pembaruan data, koordinasi, dan partisipasi masyarakat agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Tabel 4.1 Penyajian Data
Ringkasan Analisis Ketepatan Sasaran PKH

Aspek	Temuan Utama	Kendala	Dampak
Verifikasi & Validasi	Sudah sistematis dan berjenjang	SDM terbatas, data tidak sinkron	Ketidaktepatan sasaran
Kesesuaian Penerima	Berdasarkan DTSEN & DESIL	Data tidak mutakhir	Salah sasaran bantuan
Error Data	Inclusion error dominan (20–30%)	Pembaruan lambat	Inefisiensi program
Waktu Penyaluran	Umumnya tepat waktu	Kendala teknis & administratif	Keterlambatan pencairan
Koordinasi	Baik dan terstruktur	Tergantung respon pihak	Kelancaran distribusi
Pembaruan Data	Rutin & insidental	Partisipasi rendah	Data tidak akurat

Berdasarkan tabel 4.1 di atas penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk menampilkan hasil temuan secara terstruktur agar memudahkan pemahaman mengenai ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gunungsitoli. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan PKH telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi ketepatan sasaran program.

Dari aspek verifikasi dan validasi data, proses yang dilakukan sebenarnya sudah sistematis dan berjenjang, dimulai dari pendamping PKH hingga Dinas Sosial. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya manusia, ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan, serta kurangnya pembaruan data menyebabkan masih terjadinya ketidaktepatan sasaran. Hal ini berdampak pada kesesuaian penerima bantuan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Selanjutnya, dalam hal kesesuaian kriteria penerima, program telah mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta klasifikasi tingkat kesejahteraan (DESIL). Namun, perubahan kondisi sosial-ekonomi penerima yang tidak segera diperbarui menyebabkan terjadinya kesalahan sasaran. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus inclusion error dan exclusion error dengan tingkat kesalahan yang cukup signifikan, di mana inclusion error lebih dominan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem data yang digunakan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sosial di masyarakat.

Dari sisi ketepatan waktu penyaluran bantuan, secara umum program telah berjalan sesuai jadwal nasional, yaitu empat kali dalam setahun. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterlambatan yang disebabkan oleh kendala teknis seperti gangguan sistem perbankan, keterlambatan transfer dana dari pusat, serta hambatan administratif di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa faktor teknis dan administratif turut memengaruhi kelancaran distribusi bantuan.

Sementara itu, koordinasi antara Dinas Sosial dan bank penyalur dinilai sudah berjalan dengan baik dan terstruktur, baik melalui komunikasi formal maupun informal. Peran Dinas Sosial sebagai mediator serta keterlibatan pendamping PKH dalam membantu proses teknis di lapangan menjadi faktor pendukung dalam mengatasi kendala pencairan bantuan. Selain itu, pembaruan data penerima manfaat juga telah dilakukan secara rutin maupun insidental, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan koordinasi antar pihak.

Secara keseluruhan, penyajian data ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pelaksanaan PKH telah dirancang dengan baik, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya yang berdampak pada ketepatan sasaran program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam hal pembaruan data, koordinasi lintas pihak, serta partisipasi masyarakat agar pelaksanaan program PKH dapat lebih optimal dan tepat sasaran.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gunungsitoli belum sepenuhnya optimal, meskipun secara prosedural telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Fahim (2022) yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran dapat diukur dari kesesuaian antara penerima manfaat dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam konteks penelitian ini, masih ditemukannya ketidaksesuaian antara data dan kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa proses targeting belum berjalan secara maksimal.

Dari aspek verifikasi dan validasi data, pelaksanaan yang telah dilakukan secara berjenjang sebenarnya mencerminkan upaya sistematis dalam memastikan ketepatan sasaran. Namun, kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah, serta ketidaksesuaian data dengan kondisi riil menyebabkan proses ini belum efektif. Hal ini relevan dengan pandangan Alkire et al. (2023) dalam Multidimensional Targeting Framework yang menekankan bahwa penentuan sasaran harus mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat secara multidimensi, bukan hanya berdasarkan data administratif. Ketika data tidak diperbarui secara berkala, maka potensi kesalahan sasaran menjadi semakin besar.

Permasalahan inclusion error dan exclusion error yang masih berada pada kisaran 20–30% menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pembaruan data. Temuan ini mendukung pendapat Hasan (2022) yang menyatakan bahwa ketidaktepatan sasaran dapat terjadi ketika sistem tidak mampu mengakomodasi perubahan kondisi penerima manfaat secara cepat. Selain itu, dominasi inclusion error menunjukkan bahwa sistem lebih lambat dalam mengeluarkan penerima yang sudah tidak layak dibandingkan memasukkan penerima baru yang layak. Hal ini juga diperkuat oleh Suharto (2021) yang menekankan bahwa ketepatan sasaran sangat bergantung pada kemampuan program dalam menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara dinamis.

Dari sisi keterlibatan masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah ada melalui musyawarah desa dan proses verifikasi lapangan. Namun, tingkat keterlibatan tersebut belum optimal karena masih rendahnya keterbukaan dan kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan community-based targeting belum sepenuhnya berjalan efektif. Padahal, menurut Alkire et al. (2023), keterlibatan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan akurasi penentuan sasaran karena masyarakat memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi sosial di lingkungannya.

Dalam hal ketepatan waktu penyaluran, secara umum PKH telah berjalan sesuai jadwal nasional. Namun, adanya keterlambatan akibat faktor teknis dan administratif menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh ketepatan sasaran, tetapi juga oleh kelancaran distribusi. Hal ini sejalan dengan pendapat Tarsan & Ikmal (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas program dapat diukur dari tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, termasuk ketepatan waktu pelaksanaan. Keterlambatan penyaluran, meskipun bersifat sementara, tetap dapat memengaruhi pemanfaatan bantuan oleh penerima.

Selain itu, koordinasi antara Dinas Sosial dan bank penyalur yang telah berjalan cukup baik menunjukkan adanya dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan program. Namun, masih diperlukan penguatan sistem koordinasi yang lebih responsif terhadap kendala di lapangan. Hal ini berkaitan dengan teori monitoring dan evaluasi yang dikemukakan oleh Dewi (2023), yang menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan untuk mengidentifikasi hambatan dan melakukan perbaikan secara cepat. Tanpa sistem monitoring yang efektif, berbagai permasalahan teknis dan administratif akan terus berulang.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa ketepatan sasaran PKH tidak hanya bergantung pada ketersediaan data, tetapi juga pada kualitas pembaruan data, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat. Sejalan dengan Despriyani et al. (2024), ketepatan sasaran menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang lebih komprehensif, seperti peningkatan frekuensi pembaruan data, penguatan kapasitas pendamping, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Dengan demikian, program PKH diharapkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Gunungsitoli, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan. Proses penentuan penerima manfaat telah mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dilengkapi dengan verifikasi lapangan oleh pendamping PKH serta keterlibatan pemerintah desa melalui musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara sistem, upaya untuk mencapai ketepatan sasaran telah dirancang dengan baik.

Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi tingkat ketepatan sasaran. Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian antara data dengan kondisi nyata di lapangan akibat lambatnya pembaruan data, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya koordinasi dan partisipasi masyarakat. Hal ini berdampak pada munculnya inclusion error dan exclusion error dengan tingkat kesalahan yang masih cukup signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, meskipun penyaluran bantuan secara umum telah mengikuti jadwal nasional, masih terdapat kendala teknis dan administratif yang menyebabkan keterlambatan dalam pencairan bantuan. Di sisi lain, koordinasi antara Dinas Sosial dan bank penyalur telah berjalan cukup baik dan menjadi faktor pendukung dalam kelancaran distribusi bantuan. Pembaruan data yang dilakukan secara rutin dan insidental juga menjadi upaya penting, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada sinergi antar pihak dan partisipasi aktif masyarakat.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Sosial

Perlu meningkatkan kualitas dan frekuensi pembaruan data DTSEN agar lebih responsif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dan pendamping PKH, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses validasi dan sinkronisasi data.

2. Bagi Pendamping PKH

Diharapkan dapat meningkatkan intensitas monitoring dan verifikasi lapangan, serta membangun komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat. Pendamping juga perlu memberikan edukasi kepada penerima manfaat mengenai pentingnya kejujuran dan pelaporan perubahan kondisi ekonomi.

3. Bagi Pemerintah Desa

Perlu berperan lebih aktif dalam proses pendataan dan pelaporan perubahan kondisi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dalam musyawarah desa agar penentuan penerima bantuan lebih objektif dan tepat sasaran.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi yang akurat terkait kondisi sosial-ekonomi, serta mendukung proses pengawasan program agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) guna mengukur tingkat ketepatan sasaran secara lebih rinci dan memperluas cakupan wilayah penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Ajun, S. A., Canon, S., & Payu, B. R. (2024). ANALISIS KETEPATAN SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROVINSI GORONTALO. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 7(1), 8–19.
- Albar, R., & Syamsudin, S. (2024). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik*, 8(1), 51–64.
- Alkire, S., Kövesdi, F., Scheja, E., & Vollmer, F. (2023). Moderate Multidimensional Poverty Index : Paving the Way Out of Poverty. In *Social Indicators Research (Issue 0123456789)*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03134-5>
- Amalia, A. R. D., Subowo, A., & Santoso, R. S. (2024). Peran Pendamping Sosial Dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(3), 672–687.
- Ayele, Y. G. (2023). The Significance of Planning and Scheduling on the Success of Projects. *Economics & Management Information*, March 2023, 1–10. <https://doi.org/10.58195/emi.v2i1.66>
- Azhary, A., Trisnawati, A. D., Palakyah, I. Y., Apriani, R., & Cahyani, A. R. (2024). Pengaruh Publik Relation Terhadap Kepercayaan Publik Dalam Sektor Pelayanan Publik. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(6), 521–526.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9, 57 persen. Badan Pusat Statistik.

- Budiani, N. . (2023). Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pasir Pengaraian. *Jurnal Publicuho*, 5(2), 123–135.
<https://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/article/view/16021>
- Darmiyanti, R. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 5(2), 108–123. <https://doi.org/10.36341/jdp.v5i2.2776>
- Despriyani, H. L., Imanda, A., & Rikardo, Y. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. 11(2), 687–698.
- Dewi, M. P., & Sos, S. (2023). MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM CHAPTER 8-13.
- Dolly, F. I., Sofa, A., & Sakila, B. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pemerataan Kesejahteraan Sosial Di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin Iii Kabupaten Bungo. *Jurnal STIA Bengkulu : Committe to Administration for Education Quality*, 10(2), 127–136. <https://doi.org/10.56135/jsb.v10i2.160>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fadlurrohim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastrri, S. (2020). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi). *Share : Social Work Journal*, 9(2), 122.
<https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>
- Fahim, A. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 8(2), 120.
- Fardi, M., & Pratama, I. N. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 150–155.
- Gentara, R., Rachman, R., & Suprianto, S. (2023). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(3), 373–385. <https://doi.org/10.58406/jeb.v11i3.1370>
- Hana Maryana. (2024). Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol.1, No. 1, 01(01).
- Hanifah, A. N., Polyando, P., & Ernawati, D. P. (2024). Implementation Of The Family Hope Program (PKH) In Alleviating Poverty In Sumedang Regency. 13(02), 1819–1833.
- Hasan, A. (2022). Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 24–41.

- Hendajany, N., & Rizal, D. (2023). Analisis Ketimpangan Pendidikan di Jawa Barat Dengan Model Imbal Jasa Pendidikan. *Ekono Insentif*, 17(2), 123–134.
<https://doi.org/10.36787/jei.v17i2.1183>
- Hotran Yance Sinaga, Budiharjo, H. N. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. 9(2), 65–74.
- Iren Palamia, Sisca B. Kairupan, G. H. T. (2024). Ketepatan Sasaran Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. *Jurnal Cendekia Ilmiah (J-CEKI)*, 3(6).
- Kementerian Keuangan. (2024). Buku Informasi APBN TA 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Publikasi Kemenkeu RI, 1, 1–54.
<https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/454fb34d-dd52-4edf-a6cc-e443f06fe44f>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Maezura Helmi. (2023). Pemanfaatan dana bantuan PKH untuk usaha produktif (studi kasus keluarga penerima manfaat (kpm) di kecamatan jerowaru, kabupaten lombok timur.
- Manggu, B. (2020). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERBATASAN (Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat). *Sosio Konsepsia*, 9(2), 162–170. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1832>
- Merini, D. (2024). Digitalisasi Penyelenggaraan Bansos: Studi Tentang Strategi dan Tantangan di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 71–86. <https://doi.org/10.33105/itrev.v9i1.786>
- Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal. Yogyakarta: UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22(October), 1–18.
<https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
- NISA, D. Z. (2023). Layanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Sunyalangu, Kecamatan In Repository.Uinsaizu.Ac.Id. [http://repository.uinsaizu.ac.id/21820/1/Dina Zahrotun Nisa%27_Layanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Melalui Program Keluarga Harapan %28PKH%29 di Desa Sunyalangu%2C Kecamatan Karanglewas%2C Kabupaten Banyumas.pdf](http://repository.uinsaizu.ac.id/21820/1/Dina%20Zahrotun%20Nisa%27_Layanan%20Kesejahteraan%20Sosial%20Lanjut%20Usia%20Melalui%20Program%20Keluarga%20Harapan%28PKH%29%20di%20Desa%20Sunyalangu%2C%20Kecamatan%20Karanglewas%2C%20Kabupaten%20Banyumas.pdf)
- Nur Aeda, & Riadul Jannah. (2022). Implementasi dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi di Desa Kekait

- Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 165–186. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.98>
- Nurkhalim, R. F., Susilowati, I., & Jayanti, K. D. (2022). Program Keluarga Harapan: a conditional cash transfer to increase prenatal visits and birth weight. *Journal of Public Health in Africa*, 13(3), 1–8. <https://doi.org/10.4081/jphia.2022.1271>
- Oktaviani, L., & Susetyo, I. B. (2021). Analisis Efektivitas Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Kayu Putih Jakarta Timur Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), 307–318.
- Permata, A. K. D., & Parianom, R. (2025). Analisis Pendapatan, Pendidikan, Kesehatan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Jawa Barat.
- Putri, D. E. (2024). Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Program Keluarga Harapan (PKH) Tepat Sasaran Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). *IAIN Metro*.
- Rahman, J. H. (2021). Informan Penelitian Kualitatif. *Research Gate*, August, 0–7.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Romadhoni, I. I., & Qibthiyah, R. M. (2024). Program Keluarga Harapan and Senior Secondary Out-of-School Rates. 13(1), 127–142.
- Rukhmana, T. (2021). *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Sa'adah, A. T., Puspaningtyas, A., & Wahyudi, E. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(05).
- Sabarisman, Setiawan, H.H., Bambang Pujianto(2020). KETEPATAN SASARAN DAN NILAI KEMANFAATAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DI JABODETABEK. *Jurnal Cendekia Ilmiah (J-CEKI)*, 3(6).
- Santoso, A., Kurniawati, E., & Dhani, A. U. (2023). Kajian Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 17(1), 79–94.
- Saragi, S., Batoebara, M. U., & Arma, N. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>

- Sembiring, F. F. B., & Nababan, R. (2024). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terhadap Bantuan Sosial Bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Simpang Selayang Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2011. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6779–6790.
- Siregar, F. S. R. (2023). Analisis efektivitas pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Sianturi (2024). ANALISIS KETEPATAN SASARAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL PROVINSI BANTEN. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 7(1), 8–19.
- Streers, R. M. (2023). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial oleh Dinas Sosial. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 45–60.
https://journal.stialnmakassar.ac.id/index.php/jurnal_administrasi_negara/article/view/1673
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2, C). Alfabeta, Bandung.
- Suharto, E. (2021). *Kebijakan Sosial: Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyawati. (2023). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Sumbawati, N. K., Asmini, A., Juliawati, H., & Pamungkas, B. D. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ropang. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(3), 194–203.
<https://doi.org/10.58406/jeb.v8i3.570>
- Sutiyo, & Fadhilah, H. A. (2024). *Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish Digital.
- Tarsan, G., & Ikmal, N. M. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA MASYARAKAT DALAM SITUASI PENDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gersik). *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 1(2), 1–19.
- Vianti, D. I., Perencanaan, M., Pembangunan, K., & Ekonomi, F. (2023). *Jurnal Kebijakan Ekonomi Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Bersyarat Program Keluarga Harapan terhadap Partisipasi Pendidikan Anak Usia Sekolah di Indonesia Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Bersyarat Program Keluarga Harapan terhadap Partisipasi Pendidikan*. 18(2). <https://doi.org/10.21002/jke.2023.07>
- Watif, M., Ramadhani, A., Syam Almazini Tahir, L., Hikmah, N., & Negeri Makassar, U. (2024). Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3. No.4(4), 536–547.

Zakirin, M., & Arifin, J. (2022). Evaluasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. *Japb*, 5(1), 256–271.